

Legal Protection for Revenge Porn Victim Using Copyright Law : A Comparative Study Between Indonesia and the United States of America

Author:

Michelle Chandra Kasih¹ and Irna Nurhayati²

ABSTRACT

This research aims to examine (1) The possibility to enforce the protection of revenge porn under the Indonesian Copyright Law and (2) Should Indonesian Copyright Law protect revenge porn, as has been practiced by the U.S..

This research is carried out with normative descriptive and empirical research, thus collecting data from the existing applicable law, literatures and interviewing an expert in Intellectual Property, an analyst from Regional Ministry of Law and Human Rights in Yogyakarta, and 2 head officials from Indonesian Directorate General of Intellectual Property in Jakarta with qualitative and comparative approach.

This study concludes with the possibility of the Indonesian Copyright Law as a solution in a normative way. However, with the existence of regulatory and moral limitations, this solution will be hardly enforced even though the regulatory limitation is not explicitly elaborated and the derogation of moral limitation has no clear sanction and does not cover the creation. Furthermore, this research recommends the Indonesian Copyright Law to protect revenge porn and be more open on copyright protection, because it is so unfortunate if all the possibilities provided by the Indonesian Copyright Law toward revenge porn victim cannot be used effectively because of those limitations.

Keyword: Copyright, Legal Protection, Revenge Porn, Victim

¹ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2015).

² Lecturer at the Department of Business Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam
Menggunakan Hukum Hak Cipta: Studi Perbandingan Antara Indonesia
dan Amerika Serikat**

Oleh:
Michelle Chandra Kasih³ and Irna Nurhayati⁴

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) Kemungkinan penerapan perlindungan pornografi balas dendam di bawah UU Hak Cipta Indonesia dan (2) Perlukah UU Hak Cipta Indonesia melindungi pornografi balas dendam, seperti yang telah dipraktikkan oleh A.S..

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif normatif dan empiris, dengan mengumpulkan data dari hukum yang berlaku, literatur dan mewawancarai seorang ahli dalam Kekayaan Intelektual, seorang analis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah di Yogyakarta, dan 2 kepala pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia di Jakarta dengan pendekatan kualitatif dan komparatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif, UU Hak Cipta Indonesia dapat menjadi solusi. Namun dengan adanya batasan regulasi dan moral, solusi ini akan sulit ditegakkan meskipun batasan regulasi tidak secara eksplisit diuraikan sejauh mana dan pelanggaran batasan moral tidak memiliki sanksi yang jelas serta tidak mengatur tentang penciptaan. Penelitian ini turut merekomendasikan UU Hak Cipta Indonesia untuk melindungi pornografi balas dendam dan lebih terbuka tentang perlindungan hak cipta, karena sangat disayangkan jika semua kemungkinan yang disediakan oleh UU Hak Cipta Indonesia untuk korban pornografi balas dendam tidak dapat digunakan secara efektif karena adanya keterbatasan tersebut.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Pornografi Balas Dendam, Korban

³ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2015).

⁴ Dosen Departemen Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.